

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah daerah dituntut untuk memiliki kemandirian keuangan daerah yang lebih besar. Dengan tidak ketergantungannya daerah dengan bantuan dari pemerintah pusat dan propinsi yang melalui dana perimbangan berarti hal tersebut menunjukkan tingkat kemandirian keuangan yang lebih besar atau baik. Namun, dengan tingkat kemandirian yang tinggi bukan berarti daerah tidak perlu mendapatkan dana perimbangan oleh pemerintah pusat maupun provinsi. Dengan adanya bantuan dana perimbangan dapat membantu untuk pembangunan sebuah daerah yang lebih baik.

Menurut Halim, 2001 : 167 (dalam Adhiantoko) menjelaskan ciri suatu daerah yang mampu melaksanakan otonomi daerah, yaitu (1) kemampuan keuangan daerah, yang artinya daerah harus memiliki kewenangan dan kemampuan dalam menggali sumber – sumber pendapatan, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahannya, dan (2) ketergantungan terhadap bantuan pemerintah provinsi atau pusat harus seminimal mungkin. Diharapkan peranan pemerintah daerah akan menjadi lebih besar dengan menggali potensi – potensi daerah agar sumber keuangan terbesar dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Tetapi pada kenyataannya beberapa daerah masih bergantung dari bantuan pemerintah provinsi ataupun pusat. Sehingga daerahnya belum bisa mandiri.

Sejalan dengan perkembangan era globalisasi dalam sektor publik, organisasi publik dituntut untuk terus melakukan pengukuran sebuah kinerja. Menurut Mardiasmo (2002 : 121) menyatakan bahwa dalam pengukuran kinerja merupakan komponen yang penting, sebab akan memberikan umpan balik atas rencana yang telah diimplementasikan. Dengan kata lain, dapat menjadi acuan dalam melakukan sebuah kegiatan yang berhubungan dengan organisasi publik agar dapat mencapai visi misi dalam sebuah organisasi. Fungsi dari pengukuran kinerja bagi sektro publik, antara lain : (a) membantu memperbaiki kinerja pemerintah agar dapat berfokus pada tujuan dan sasaran program kerja yang

nantinya akan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas sektor publik dalam memberikan layanan kepada masyarakat, (b) ukuran kinerja sektor public digunakan untuk pengalokasian sumber daya dan pembuat keputusan, (c) untuk mewujudkan tanggung jawab public dan memperbaiki komunikasi kelembagaan. Pengukuran kinerja keuangan penting adanya dalam hal keuangan daerah, yang bertujuan untuk menilai akuntabilitas pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan daerah dan dituangkan dalam bentuk laporan keuangan yang bertujuan untuk menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, serta kinerja keuangan pemerintah daerah yang berguna dalam pengambilan keputusan serta dapat menunjukkan akuntabilitas laporan atas sumber daya yang dikelola oleh pemerintah daerah.

Menurut Halim (2007:230), alat untuk menganalisis kinerja keuangan pemerintah daerah dalam hal mengelola keuangan daerahnya adalah dengan menerapkan rasio keuangan terhadap APBD yang meliputi rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efisiensi, rasio pertumbuhan dan rasio efektivitas. Kinerja keuangan pemerintah dapat diukur dari seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam menggali potensi-potensi yang dimiliki daerahnya sehingga mampu memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan pendapatan daerah setiap tahunnya. Menurut Halim (2007:241) rasio pertumbuhan pendapatan daerah dapat menunjukkan seberapa besar kemampuan yang dimiliki pemerintah daerah untuk mempertahankan atau meningkatkan pertumbuhan pendapatannya dari satu periode ke periode berikutnya. Semakin tingginya pertumbuhan pendapatan daerah dan bernilai positif setiap tahunnya mengindikasikan bahwa pemerintah daerah telah mampu meningkatkan pertumbuhan pendapatan daerahnya. Pertumbuhan pendapatan daerah mengalami kenaikan setiap tahunnya menyebabkan pemerintah daerah mampu memenuhi segala kebutuhan daerahnya dan memberikan indikasi bahwa keuangan daerah telah mampu dikelola dengan baik oleh pemerintah daerah.

Kabupaten Tuban merupakan salah satu Kabupaten di utara ujung barat di Jawa Timur yang berbatasan dengan Provinsi Jawa Tengah. Beberapa permasalahan keuangan daerah yang dihadapi oleh Kabupaten Tuban, antara lain :

- 1) ketergantungan pemerintah daerah kepada bantuan pemerintah pusat maupun

provinsi yang tercermin dalam besarnya dana perimbangan, 2) kurangnya kemampuan daerah dalam menggali potensi sumber – sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tercermin dari penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang relatif kecil dibandingkan dengan total penerimaan daerah, 3) inefisiensi pemerintah daerah dalam melakukan belanja daerah

Kabupaten yang menjadi pembanding dalam Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Tuban adalah Kabupaten Lamongan, Lamongan merupakan Kabupaten yang berada tepat di Timur kabupaten Tuban. Kabupaten Lamongan yang dari segi strategis hampir sama dengan Kabupaten Tuban yang memiliki potensi sumber daya yang hampir sama pula dengan Kabupaten Tuban. Untuk menilai kinerja pemerintah daerah baik atau buruknya, selain dengan aspek finansial dapat dinilai berdasarkan aspek non finansial untuk dapat menciptakan keputusan yang tepat dalam menilai dan mengukur kinerja pemerintahan. Aspek finansial menggambarkan secara nyata bagaimana pengelolaan pendapatan yang diserap dari masyarakat kembali kepada masyarakat dalam bentuk pelayanan publik, sedangkan aspek non finansial menggambarkan bagaimana pelayanan yang dilakukan pemerintah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat secara nyata.

Permasalahan yang dialami Kabupaten Lamongan, apabila dilihat berdasarkan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) tahun 2016 – 2021, salah satu permasalahan yang dialami oleh Kabupaten Lamongan adalah tata kelola pemerintahan yang berhubungan dengan peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah yang masih perlunya peningkatan dalam hal akuntabilitas pelaporan keuangan. Permasalahan lainnya berkaitan dengan peningkatan layanan publik kepada masyarakat. Tata Kelola pemerintah yang baik dapat mendorong terwujudnya pelayanan publik yang prima. Pemerintah Kabupaten Lamongan perlu memfokuskan pada upaya peningkatan pelayanan publik kepada masyarakat, yang dapat dievaluasi secara periodik dengan mengukur Indeks Kepuasan Masyarakat. Selain masalah non finansial, terdapat juga permasalahan finansial yang berkaitan dengan sarana dan prasarana (infrastruktur). Salah satu fokus pembangunan infrastruktur di Kabupaten Lamongan adalah

pembangunan jalan, permasalahannya lainnya berkaitan dengan genangan air di wilayah Bengawan Jero yang merupakan wilayah cekungan dan memiliki elevasi dibawah permukaan air laut sehingga dalam kondisi tertentu akan mengalami banjir.

Berdasarkan isu – isu strategis pada RPJMD Kabupaten Lamongan dapat diketahui dari sisi finansial bahwa pada realisasi belanja pada pemerintah daerah Kabupaten Lamongan dengan permasalahan infrastruktur yang telah dijelaskan, bahwa realisasi belanja pada tahun 2014 – 2017 lebih besar pada sisi belanja tidak langsung (belanja rutin) dibandingkan dengan belanja langsung (pembangunan). Apabila dikaji satu persatu permasalahan Kabupaten Lamongan dilihat dari RPJMD masih banyak permasalahan pembangunan yang berhubungan pada sisi belanja tidak langsung (belanja pembangunan), seperti masalah kurangnya sarana dan prasarana Pendidikan, sarana dan prasarana Kesehatan (peralatan dokter sesuai standar Rumah Sakit kelas B), serta masalah pembangunan yang berkaitan dengan perdagangan seperti halnya kondisi pasar yang belum baik dan perlunya dilakukan revitalisasi. Tetapi pada kenyataannya berdasarkan realisasi APBD Kabupaten Lamongan dari sisi belanja masih condong pada belanja tidak langsung (belanja rutin) dengan permasalahan pembangunan sedemikian rupa.

Dengan demikian penulis dapat jadikan pembelajaran dan pengetahuan dengan membandingkan kinerja keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Tuban dengan Kabupaten Lamongan melalui kinerja keuangan daerah masing - masing. Untuk mengetahui Kinerja keuangan Kabupaten Tuban dan Kabupaten Lamongan tahun 2013 sebagai acuan untuk melihat kinerja keuangan kedua Kabupaten pada tahun berikutnya, dapat dilihat pada Tabel 1.1, dibawah ini :

Tabel 1. 1 Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Tuban dan Kabupaten Lamongan Tahun 2013

| Rasio Keuangan | | Kab. Tuban | Kab. Lamongan |
|-----------------------|-------------------------------|-------------------|----------------------|
| Rasio Kemandirian | | 15% | 10% |
| Rasio Efektivitas | | 122% | 129% |
| Rasio Efisiensi | | 98% | 96% |
| Rasio Aktivitas | Rata-rata belanja rutin | 3% | 27% |
| | Rata-rata belanja pembangunan | 18% | 15% |
| Rasio Pertumbuhan | | 3% | 36% |

Sumber Data : DJPK (Diolah)

Dari Tabel 1.1 Halaman 4 terlihat bahwa pada rasio kemandirian, rasio efiseinsi, rasio aktivitas dari rata - rata belanja pembangunan Kabupaten Tuban lebih unggul dibandingkan dengan Kabupaten Lamongan. Sedangkan keunggulan Kabupaten Lamongan terlihat pada rasio efektivitas, rasio aktivitas dari rata – rata belanja pembangunan, dan rasio pertumbuhan. Dari hasil perhitungan rasio keuangan Kabupaten Tuban dan Kabupaten Lamongan tahun 2013, dapat dijadikan acuan dalam menganalisis kinerja keuangan kedua kabupaten untuk tahun anggaran 2014 – 2018.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban dan Lamongan ?
2. Bagaimana Perbandingan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban dan Lamongan ?

C. Batasan Masalah

Agar penelitian ini dapat dilakukan lebih fokus, sempurna, dan mendalam maka penulis memandang permasalahan penelitian yang diangkat perlu dibatasi. Oleh sebab itu, penulis membatasi diri hanya berkaitan dengan Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban dan Lamongan tahun anggaran 2014 - 2018 dilihat dari Anggaran dan Realisasi APBD pada sisi Pendapatan dan Belanja pada Kabupaten Tuban dan Kabupaten Lamongan.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

a. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban dan Lamongan
2. Mengetahui Perbandingan Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Tuban dan Kabupaten Lamongan

b. Manfaat Penelitian

1. Bagi penulis, untuk menambah pengetahuan dan wawasan penulis tentang analisis kinerja keuangan pada Pemerintahan Daerah Kabupaten Tuban dan Kabupaten Lamongan.
2. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban dan Kabupaten Lamongan, diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan mengenai keuangan pemerintah daerah sehingga tujuan yang diharapkan dapat tercapai.

